

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Sebagai pelaksana teknis, Suku Dinas Bina Marga bertugas membangun dan memperbaiki trotoar sesuai permintaan, dengan memprioritaskan jalur yang banyak dilalui masyarakat dan terintegrasi dengan fasilitas umum seperti halte dan stasiun. Kami selalu menerapkan standar nasional dan internasional untuk aksesibilitas difabel termasuk pemasangan *guiding block*, *ramp*, dan *walker*, mengikuti acuan teknis yang diakui secara global. Dalam pelaksanaannya, kami berkordinasi erat dengan Dinas Perhubungan agar trotoar yang dibangun benar-benar terkoneksi dengan moda transportasi massal. Dengan pendekatan ini, kami berkomitmen menghasilkan trotoar yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga inklusif bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, seperti tuna rungu dan tuna daksa.
2. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan, penulis menemukan kesimpulan bahwa aksesibilitas trotoar di Pasar Minggu masih sangat jauh dari kata layak. Sebab dalam kondisi lapangan telah terjadi alihfungsi pada trotoar di kawasan Pasar Minggu, yakni menjadi lapak pedagang kaki lima, lapak parkir liar, serta minimnya fitur pendukung bagi penyandang disabilitas seperti tidak adanya *guiding block*. Kemudian keberadaan trotoar yang ada disekitar halte dan stasiun tidak menunjukkan bentuk yang ramah terhadap disabilitas, hal itu berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi.
3. Bagi penyandang disabilitas yang mobilitasnya sangat bergantung pada alat bantu seperti kursi roda atau kruk, merasakan fungsi trotoar yang selayaknya menjadi jalur yang aman dan nyaman, namun sering justru menjadi hambatan nyata. Kondisi permukaan yang tidak rata, *guide block* yang tidak konsisten, serta trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima dan kendaraan parkir di kawasan Pasar Minggu membuat saya kesulitan melintas dengan alat bantu, bahkan terpaksa turun ke badan jalan yang

jelas berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki trotoar dan memasang fasilitas aksesibilitas sebagaimana diupayakan pemerintah DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif, khususnya yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

## 5.2 Saran

1. Mengenai ketersediaan trotoar di pasar minggu yang ramah terhadap penyandang disabilitas, disini penulis melihat bahwa diperlukan penataan ulang mengenai *locus* pembangunan trotoar. Sebab dari apa yang diamati, trotoar yang berada dalam lingkaran mobilitas transportasi umum seperti halte dan stasiun kereta dalam keadaan buruk.
2. Selanjutnya perlu adanya ketegasan dari dinas terkait untuk bersama-sama melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melakukan dan/atau mendirikan lapak diatas trotoar dengan karakteristik ramah penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan itu, yaitu melakukan revitalisasi terhadap trotoar yang ada, khususnya di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
3. Kepada suku dinas bina marga Jakarta Selatan, dalam hal ini pembangunan trotoar yang rencananya akan dilaksanakan proyek baru pada tahun 2026, perlu memperhatikan kepentingan dari penyandang disabilitas, seperti kepastian fitur penunjang pada informasi pemberitahuan yang menggunakan huruf *braille*, alat bantu dengar, serta ketersediaan lampu merah untuk melakukan penyebarangan dari trotoar satu menuju yang lain.